



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN 2022



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Karmunik Loyal Adaptif Kolaboratif

UKPBJ
PROVINSI NTT
Center of Excellence

IAS
ACCREDITED



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LKPJ disusun untuk menyajikan capaian kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian outcome dan output dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan target RPJMD Tahun 2020-2023. Selain capaian yang dicapai. Dokumen LKPJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan permasalahan dan solusi penyelesaian.

LKPJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan capaian pada awal tahun anggaran 2022, Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 16 Februari 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196311191989031009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk memberi masukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan RKPd Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Dasar hukum dalam penyusunan LKPj Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada tahun 2023 provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi Provinsi yang sejahtera dengan Visi **“Nusa Tenggara Timur bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan

akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan.

BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa 'tidur panjang' untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong.

Tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret kedalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2020-2023 sebagai berikut :

1. Misi 1 : **Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**
2. Misi 2 : **Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**
3. Misi 3 : **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**
4. Misi 4 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
5. Misi 5 : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Untuk mencapai visi tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan misi yang merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah yang terdapat pada **MISI V: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Misi ke 5 tersebut diturunkan dalam tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 yang berhubungan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT adalah : **“Menciptakan Birokrasi yang Profesional dengan Karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”**.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 tang berkaitan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA provinsi NTT adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif”**.

1.3 Data Umum Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan bulan Desember 2022 didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 66 Orang yang terdiri dari 46 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 Orang dengan Perjanjian Kerja, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Kepegawaian

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-B	1	1	-
2	Pejabat Eselon III-A	3	2	1
3	Pejabat Eselon IV-A	1	1	-
4	Pejabat Fungsional	11	6	5
Jumlah		16	10	6

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, 2022

Tabel 2
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pasca Sarjana (S-2)	10	8	2
2	Sarjana (S-1)	35	29	6
3	Diploma III (D-III)	2	1	1
4	SLTA/SMK	4	2	2
Jumlah		51	40	11

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, 2022

Tabel 3
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	6	5	1
2	Golongan III	41	33	8
3	Golongan II	4	3	1
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah			41	10

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, 2022

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terdapat Tenaga Kontrak / Honorer yang dibiaya oleh APBD Provinsi NTT sebanyak 14 orang.

2. Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT

Memperhatikan pasal (14) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas : *membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan **perumusan kebijakan daerah** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan **pengoordinasian perumusan kebijakan** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

3. Penyiapan ***pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah*** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan ***pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan*** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah organisasi perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Uraian tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merumuskan program kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dipercaya dan tidak diskriminatif.

Adapun perincian tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan **penyusunan program kegiatan** serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
7. Mengoordinasikan **penyiapan perumusan kebijakan daerah** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
8. Mengoordinasikan **penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
9. Mengoordinasikan **penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan** di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian, masing-masing dengan rumusan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Tugas Bagian Pengelolaan PBJ adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa meliputi pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

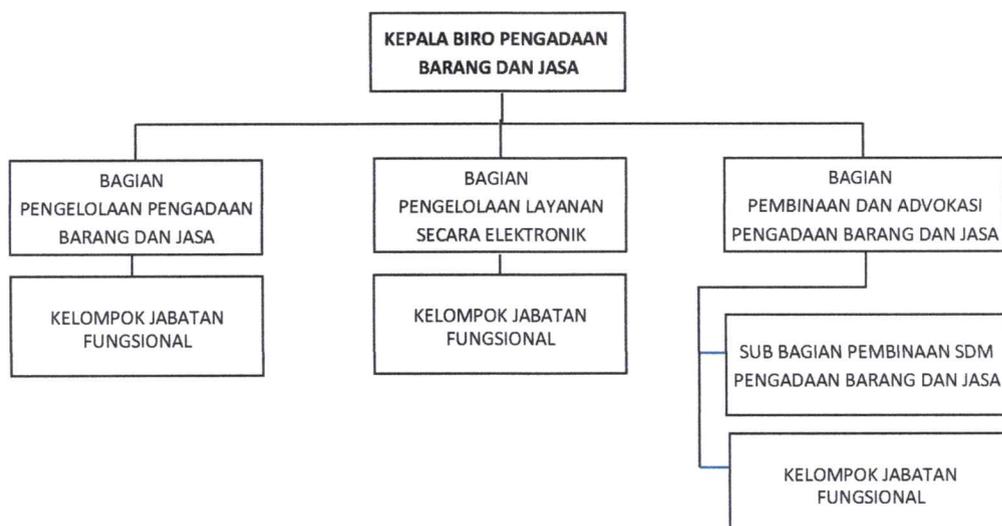
Tugas Bagian Pengelolaan LPSE adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPSE yang meliputi pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi serta pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku.

3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Tugas Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut :

BAGAN 1 :
Struktur Organisasi
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Peraturan Gubernur NTT No. 1 Tahun 2022

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PENGADAAN BARANG JASA TAHUN ANGGARAN 2022

2.1. Program - Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

2.1.1. Program/ Kegiatan dan Anggaran

Total anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 murni sebesar Rp. 8.220.595.720,- (delapan milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 8.029.567.101,- (delapan milyar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus satu rupiah) pada APBD Perubahan untuk membiayai 2 (dua) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, 9 kegiatan dan 25 Sub kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.867.604.600,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus enam puluh empat juta enam ratus rupiah) atau 97,98 %, dengan perincian sebagaimana dalam tabel :

Realisasi Penyerapan Anggaran pada 2 Program sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Program	DPPA 2022	Realisasi s.d. 31 Desember 2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.439.961.720	1.424.292.959
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.589.605.381	6.443.311.641

JUMLAH	8.029.567.101	7.867.604.600	97,98%
---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Berdasarkan Tabel diatas realisasi program Tahun 2022 mencapai 97.98% Realisasi penyerapan anggaran pada 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi penyerapan anggaran pada 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan

Prog / Keg	Su b Keg	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI S/D DESEMBER 2022	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.439.961.720	1.424.292.959	98.91
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.312.000	68.506.00	98.84
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	26.312.000	25.546.000	96.95
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	42.962.000	42.962.000	100.00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.562.245	6.808.245	54.20
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.562.245	6.808.245	54.20
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.909.000	167.541.904	94.17
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.149.000	3.100.000	98.44
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	-	0
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.925.600	8.925.400	100.00
	07	Penyediaan Bahan /Material	53.616.400	53.594.450	99.96
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.236.000	36.236.000	100.00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.982.000	75.976.054	99.99
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.553.655	109.899.750	99.41
	05	Pengadaan Mebel	0	-	0
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.553.655	109.899.750	99.41

08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	977.374.820	965.993.090	98.84
	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	20.760.000	20.760.000	100.00
	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	541.156.400	541.153.000	100.00
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.552.900	3.552.900	100.00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.905.520	400.527.190	97.24
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.250.000	89.511.970	97.03
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.740.000	76.001.970	96.52
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.510.00	13.510.00	100.00
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.589.605.381	6.443.311.641	97.78
01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.388.581	358.838.589	99.57
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	31.264.481	31.264.481	100.00
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	190.046.300	190.046.151	100.00
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.077.800	137.527.957	98.89
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	425.953.700	392.789.500	92.21
	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	147.209.400	143.452.400	97.45
	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	152.605.400	121.598.200	79.68
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	126.138.900	125.238.900	99.29
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.803.263.100	5.697.553.552	98.18
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.719.870.700	5.616.460.052	98.19
	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	67.429.200	63.897.300	94.76

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

2.2. Target dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

2.2.1. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2022 - APBD

Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima **Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD** dengan rincian menurut Jenis Paket dan Sumber Pembiayaan sebagai berikut :

Terdapat paket sebanyak 408 paket (sumber APBD) yang diserahkan kepada Biro PBJ SETDA Provinsi NTT telah selesai proses tender sebanyak 407 paket dari Total Paket sebanyak 411 paket tender.

Tabel 6
DAU

No	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender		Penunjukan Langsung	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	13	55.546.198.357	13	55.546.198.357	10	49.742.338.515,97	2	1.034.294.000
2.	Barang	33	56.847.673.357	33	56.847.673.357	29	45.842.993.698.94	2	804.562.500
3.	Konsultansi	6	50.557.156.723	6	50.557.156.723	5	45.757.753.300.85	-	-
4.	Jasa Lain	5	47.633.761.723	5	47.633.761.723	4	43.209.462.809.26	1	1.498.833.000
Total Paket DAU		57	210.584.790.160	57	210.584.790.160	48	191.657.883.166	5	

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Tabel 7
DAK

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	17	171.289.600.550	17	171.289.147.907	17	171.289.600.550
2.	Barang	2	1.956.019.810	2	1.955.038.852,90	2	1.886.000.427,50
3.	Konsultansi	6	3.179.738.000	6	3.179.738.000	6	3.179.738.000
4.	Jasa Lain	0	0	0	0	0	0
Total Paket DAU		25	176.425.358.360	25	176.420.251.760,64	25	169.203.840.468,01

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Tabel 8
PT. SMI

NO	JENIS PAKET	JUMLAH PAKET	PAGU
1.	Konstruksi	3 Paket	57.524.500.000,00
2.	Barang	2 Paket	17.600.000.000,00
3.	Konsultasi	-	-
4.	Jasa lainnya	-	-
Total Paket PBJ TA 2021 yang masih berproses di Tahun 2022		5 Paket	75.124.500.000,00

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

2.2.2. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2022 - APBN

Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima **25 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBN** dengan rincian menurut Jenis Paket dan Sumber Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 9
APBN

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender		Penunjukan Langsung	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	1	7.931.000.000	1	7.931.000.000	1	7.590.989.602,83	0	0
2.	Barang	22	14.602.850.000	22	14.602.850.000	14	9.639.100.000	8	4.963.750.000
3.	Konsultansi	1	270.500.000	1	270.500.000	1	260.517.000	0	0
4.	Jasa Lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Paket DAU		24	22.804.350.000	24	22.804.350.000	16	17.490.606.602,83	8	4.963.750.000

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

2.3. Perubahan Kegiatan dan alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 (Refocusing)

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan PAGU anggaran sesuai kebijakan daerah dan nasional untuk penanganan dan penanggulangan COVID 19.

Refocusing anggaran dilaksanakan pada program/kegiatan berpengaruh pada pencapaian dengan target – target tahun 2022.

Adapun perubahan program/kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 10
Perubahan Kegiatan dan alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 (Refocusing

No.	Program/ Kegiatan		DPA	DPPA
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	1.289.557.020,-	1.439.961.720,-
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	63.472.000,-	69.312.000,-
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian PD	Rp	26.847.000,-	12.562.245,-
	Kegiatan : Administrasi Umum PD	Rp	127.272.900,-	177.909.000,-
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp	129.957.600,-	110.553.655,-
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp	979.715.120,-	977.374.820,-

	Kegiatan :	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Rp	92.250.000,-	92.250.000,-
2.	Program : Kebijakan dan Pelayanan PBJ		Rp	6.931.038.700,-	6.589.605.381,-
	Kegiatan :	Pengelolaan PBJ	Rp	383.409.100,-	360.388.581,-
	Kegiatan :	Pengelolaan LPSE	Rp	449.491.700,-	425.953.700,-
	Kegiatan :	Pembinaan dan Advokasi PBJ	Rp	6.117.459.900,-	<u>5.803.263.100,-</u>
				-	-

Sumber:DPPA Biro PBJ 2022

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, maka capaian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Rencana belanja daerah untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.220.595.720,- mengalami penurunan anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp. 191.028.619,- sehingga menjadi sebesar Rp. 8.029.567.101,- untuk melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan.

Dari total belanja langsung tersebut, terealisasi sebesar Rp. **7.867.604.600,-** atau **97,98%**.

TABEL 11
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2022	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	3	4	5	6	7	8		
1	Pengadaan barang/jasa	Presentase jumlah paket pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan (Tender-N)	99.03 %	100 %	100 %	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	Peningkatan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku
		Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4 orang	12 orang	0 orang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	Peningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola barang dan jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang/jasa

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2022	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	3	4	5	6	7	8		
		Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%	100%	100%	Menciptakan pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Peningkatan Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Terlaksana pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Sumber: Biro PBJ SETDA Prov. NTT, Desember 2022

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan Urusan Pilihan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 12
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.439.961.720	Rp.1.424.292.959 (98.91%)	Terjadi refocusing anggaran pada tahun anggaran berjalan	Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Provinsi NTT terkait proses penganggaran dan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.69.312.000	RP. 68.506.00 (98.84%)		
		Sub Kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp.26.312.000 Rp.42.962.000	Rp.25.546.000 Rp.42.962.000		

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.12.562.245	Rp.6.808.245 (54.20%)		
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.177.909.000 Rp.3.149.000 0 Rp.8.925.600	Rp.167.541.904 (94.17%) Rp.3.100.000 - Rp.8.925.400		

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penyediaan Bahan /Material 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.53.616.400 Rp.36.236.000 Rp.75.982.000	Rp.53.594.450 Rp.36.236.000 Rp.75.976.054		
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.110.553.655 0 Rp.110.553.655	Rp.109.899.750 (99.41%) - Rp.109.899.750		

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2. Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.977.374.820 Rp.20.760.000 Rp.541.156.400 Rp.3.552.900 Rp.411.905.520	Rp.965.993.090 (98.84%) Rp.20.760.000 Rp.541.153.000 Rp.3.552.900 Rp.400.527.190		
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa	Rp.92.250.000 Rp.78.740.000	Rp.89.511.970 (97.03%) Rp.76.001.970		

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.13.510.000	Rp.13.510.000		
2.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Program: Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Strategi PBJ 2. Pelaksanaan PBJ 3. Pemantauan dan	Rp. 6.589.605.381 Rp. 360.388.581 Rp. 31.264.481 Rp. 190.046.300 Rp. 139.077.800	Rp 6.443.311.641 (97.78%) Rp. 358.838.589 (99.57%) Rp. 31.264.481 Rp. 190.046.151 Rp. 137.527.957	Terjadi refocusing anggaran pada tahun anggaran berjalan	Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Provinsi NTT terkait proses penganggaran dan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi PBJ				
		Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 2. Pengembangan Sistem Informasi PBJ 3. Pengelolaan Informasi PBJ	Rp. 425.953.700 Rp. 147.209.400 Rp. 152.605.400 Rp. 126.138.900	Rp. 392.789.500 (92.21%) Rp. 143.452.400 Rp.121.598.200 Rp. 125.238.900		
		Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan PBJ 2. Pendampingan,	Rp. 5.803.263.100,- Rp. 5.719.870.700	Rp. 5.697.553.552 Rp. 5.616.460.052 Rp. 63.897.300		

No	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
		Konsultasi dan Bimbingan Teknis	Rp. 67.429.200			

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

TABEL 13
KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN MASALAH YANG DI SELESAIKAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas POKJA pemilihan penyedia 2. Implementasi tata kelola SPSE sesuai ketentuan 3. Peningkatan fungsi koordinasi lintas sektor PBJ pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan MONEV serta pelaporan secara berkala 4. Seleksi/ review POKJA Pemilihan Penyedia
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM PPBJ melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis PPBJ

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN MASALAH YANG DI SELESAIKAN
1	2	3	4
	sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2. Pemenuhan jumlah JF PPBJ sesuai ketentuan yang berlaku
3	Menciptakan pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan, MONEV dan pelaporan secara berkala PBJ lintas sektor PBJ 2. Implementasi tender-non tender, e-purchasing, Katalog lokal sesuai ketentuan 3. Pengumuman RUP sesuai ketentuan yang berlaku 4. Peningkatan infrastruktur PBJ secara elektronik

Sumber: Biro PBJ SETDA Prov. NTT, Desember 2022

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

REKOMENDASI DPRD PROVINSI NTT

NO	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN ANGGARAN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Perlu dijaga konsistensi penyerapan anggaran (realisasi). Mengingat masih terdapat kegiatan dengan penyerapan anggaran dibawah 50%;	<p>1. Penyerapan anggaran di bawah 50% disebabkan karena terjadi perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang semula tatap muka menjadi virtual/daring (dalam jaringan) sehingga terjadi penghematan belanja seperti belanja makan minum dan sewa gedung.</p> <p>Untuk menjaga konsistensi penyerapan anggaran/realisasi melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan secara konsistensi; b) Pengendalian penggunaan anggaran secara tepat waktu, jumlah dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>1. Terlaksananya program dan kegiatan sesuai perencanaan dan penganggaran;</p> <p>2. Adanya dukungan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.</p>
2	Perlu terus dan ditingkatkan kinerja kelembagaan yang terintegrasi, efisien, efektif, adil,transparan, bebas dan bersih dari korupsi,	Mendorong peningkatan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang terintegrasi, efisien, efektif,	

	<p>kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara tetap dan konsisten berinteraksi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang terus berkembang.</p>	<p>adil,transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik menggunakan aplikasi; b) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDA) pengelola pengadaan barang/jasa; c) Melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pelaku pengadaan barang/jasa; d) Tetap menjaga kode etik dan integritas serta independensi pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan pengelolaan pengadaan barang/jasa 	
--	--	--	--

3.3.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dan program yang dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara realita keseluruhan capaian program dan kegiatan sampai akhir Desember 2022 menunjukkan adanya kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil. Ada kegiatan dalam target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mengalami selisih karena disebabkan adanya Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan yang bersifat tatap muka dialihkan menjadi secara virtual.

Selanjutnya hasil analisis sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT terhadap Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan kategori BB "SANGAT BAIK", dengan demikian pernyataan Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Kinerja yang Handal.

Kewenangan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu urusan pendukung urusan pemerintahan, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dituangkan dalam format Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan.

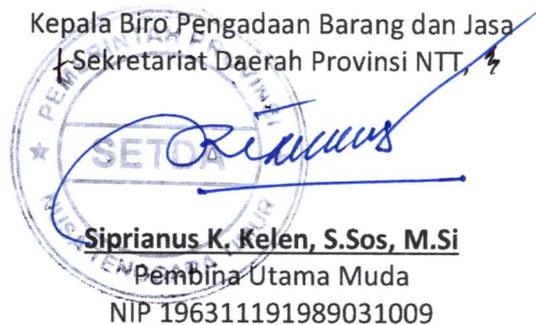
BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program dan kegiatan Tahun 2022.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 16 Februari 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196311191989031009